

PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN JALAN PERTANIAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI JAMBI

Oleh: Adi Rahman, Azrin Agus, Asnelly Ridha Daulay dan Mukhlis

1. Latar belakang

Jalan usahatani atau jalan pertanian merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan peternakan) untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, dan mengangkut hasil produk pertanian, dari lahan menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan, atau pasar, sebagian besar jalan usahatani masih berupa tanah atau berlapis kerikil, namun di beberapa tempat sudah ada jalan usahatani yang beraspal. (Sechetz, BE dan Steven MB, 2009; Toliver D, 1911).

Pembangunan jalan pertanian di Provinsi Jambi menghadapi sejumlah masalah, antara lain: a) Usulan pembangunan jalan banyak tapi dana pemerintah terbatas, b) Petani kurang memiliki kesadaran untuk merawat jalan pertanian, c) Kurang tersedianya data perkembangan jalan pertanian baik di tingkat kabupaten/kota maupun di Provinsi Jambi, d) lemahnya koordinasi antar instansi terkait sebagai pembina teknis dengan Institusi pengelola kegiatan jalan pertanian, e) kurangnya pembinaan instansi teknis dalam pemeliharaan dan keberlanjutan jalan pertanian dan, f) lokasi pembangunan jalan pertanian sering diintervensi kepentingan politis.

2. Tujuan penelitian

1. Menganalisis kondisi eksisting jalan pertanian di Provinsi Jambi.
2. Menganalisis partisipasi masyarakat dan dampak keberadaan jalan pertanian terhadap sosial ekonomi masyarakat.
3. Merancang Indikator penentuan kelayakan calon lokasi jalan pertanian.
4. Menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan pertanian agar tetap berkelanjutan.

3. Temuan Penelitian

3.1. Kondisi Existing Jalan Pertanian Di Provinsi Jambi

Hasil pengamatan di lima kabupaten (Tebo, Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh) diperoleh gambaran umum serta permasalahan paling menonjol sebagaimana diuraikan pada Tabel berikut.

Tabel 1. Gambaran masalah jalan pertanian di Provinsi Jambi

No	Masalah	Keterangan
1	Model jalan pertanian	Bentuk, lebar dan material pembangunan jalan pertanian bervariasi, disesuaikan dengan selera kelompok tani, alokasi dana dan pertimbangan lainnya.
2.	Perawatan jalan	Umumnya kondisi jalan bersemak/ditutupi rumput, parit jalan tertutupi batuan/tanah, dan jalan berlobang serta digenangi air pada musim hujan.
3.	Pemanfaatan jalan	Belum ditemukan jalan pertanian yang dikembangkan untuk pemanfaatan lain misalnya untuk tujuan wisata atau olah raga (jogging track, sepeda dll)
4.	Konektivitas jalan pertanian	Belum semua jalan pertanian terkoneksi dengan jalan lingkungan desa.
5.	Pendanaan	Peluang pendanaan terbuka melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) namun proses pengusulan melalui e-proposal kurang dikenal/kurang direspon oleh petani.
6.	Alih fungsi lahan pertanian	Meskipun belum menjadi gejala masif namun ditemukan lahan yang telah beralih fungsi di kawasan pertanian yang dibangun jalan pertanian.
7.	Daya tahan jalan	Jalan pertanian di lahan gambut lebih cepat rusak (mudah amblas) dibanding jalan di atas lahan mineral. Akhir-akhir ini jalan pertanian di lahan gambut dibangun dengan konstruksi rigid beton dengan alokasi dana dua kali lebih besar dibanding konstruksi jalan di lahan mineral.
8.	Skema pengerjaan jalan pertanian	Pengerjaan jalan pertanian lewat APBD Provinsi atau kabupaten dilakukan dengan menunjuk pihak ketiga, namun untuk dana APBN (DAK) dikerjakan secara swakelola.
9	Intervensi kepentingan politis	Penetapan lokasi pembangunan jalan pertanian rawan diintervensi kepentingan anggota DPRD/pihak lain, sehingga terkadang lokasi pembangunan JP bukan berada di daerah yang paling prioritas.

Sumber: Data penelitian, 2018

3.2. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Jalan Pertanian Dan Dampaknya Pada Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Idealnya setiap pembangunan perlu di kaji dari dua sisi, tidak hanya dampak baiknya saja tetapi juga perlu dianalisis dampak buruknya yang muncul, sehingga kebijakan yang akan diambil bisa lebih komprehensif. Penelitian ini mencoba menganalisis tentang pengaruh partisipasi masyarakat terhadap Jalan Pertanian dan dampaknya yang bersifat baik dan buruk. Dampak baik terdiri dari dua variabel yaitu variabel ekonomi dan variabel sosial, sedangkan dampak negatif terdiri dari satu variabel yaitu dampak buruk.

Penjelasan mengenai item indikator dari setiap variabel penelitian diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Item Indikator dari variabel penelitian

No	Variabel Penelitian	Item Indikator
1	Partisipasi Masyarakat	1. Mengikuti rapat perencanaan pembangunan 2. Memberikan saran atau masukan dalam rapat perencanaan pembangunan 3. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan pembangunan 4. Memanfaatkan JP dengan baik 5. Menjaga dan memelihara JP 6. Gotong royong memperbaiki JP
2	Keberadaan Infrastruktur Jalan Pertanian	1. JP menjangkau ke lokasi usaha tani 2. Memudahkan petani menuju ke lokasi usaha tani 3. Dapat dilalui oleh petani dan masyarakat 4. Dapat dilalui kendaraan roda dua 5. Dapat dilalui oleh alat mekanisasi pertanian (hand traktor, mesin pertanian dsb) 6. Memenuhi kebutuhan pengangkutan produksi pertanian (hasil panen dsb) 7. JP menghubungkan ke Jalan desa atau jalan lain
3	Dampak Ekonomi	1. Memudahkan penyediaan barang-barang yang dibutuhkan petani 2. Memungkinkan tersedianya barang-barang kebutuhan usaha tani dengan biaya lebih murah 3. Dapat menambah luas garapan lahan pertanian 4. Dapat meningkatkan kebutuhan modal usaha petani 5. Dapat meningkatkan keuntungan usaha tani 6. Dapat meningkatkan nilai aset usaha seperti harga tanah dan sewa lahan 7. Dapat menambah penyerapan tenaga kerja

4	Dampak Sosial	<ol style="list-style-type: none">1. Memperlancar jasa transportasi pengangkutan orang dan barang2. Memfasilitasi terjadinya pertukaran informasi antar petani maupun orang lain3. Memfasilitasi perjalanan untuk bersantai atau rekreasi4. Memudahkan pemanfaatan teknologi baru (mekanisasi pertanian, bibit, pupuk, obat-obatan)5. Menambah keindahan desa6. Memudahkan kegiatan penyuluhan.
5	Dampak Buruk	<ol style="list-style-type: none">1. Menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian2. Memunculkan penyimpangan sosial di masyarakat seperti pencurian hasil pertanian, kriminalitas dan sebagainya3. Memicu terjadinya pencemaran lingkungan seperti sampah, zat kimia, asap kendaraan dan sebagainya4. Menimbulkan terjadinya kerusakan lingkungan seperti banjir, longsor dan sebagainya5. Memicu konflik lahan antar warga6. Memicu terganggunya lahan konservasi (hutan lindung, hutan adat dan sebagainya)

Variabel-variabel pada tabel 2 diatas kemudian di analisis menggunakan metode *Structural Equation Modelling Varian Based* atau yang lebih dikenal dengan *Partial Least Square* (PLS). Hasil analisis dapat diketahui bahwa secara tidak langsung partisipasi menentukan keberadaan JP dan berdampak pada ekonomi masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien parameter Keberadaan JP sebesar 0.781 dan Nilai t-statistiknya 19.304 artinya terdapat pengaruh positif antara keberadaan JP terhadap perekonomian masyarakat secara signifikan. Dengan kata lain artinya jika partisipasi masyarakat dalam perencanaan/pembangunan/pemeliharaan JP meningkat maka kondisi JP akan semakin baik. Dengan semakin baiknya kondisi JP tersebut akan semakin meningkatkan ekonomi masyarakat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa JP sangat penting bagi perekonomian masyarakat tani.

Sementara itu pada pengaruh partisipasi masyarakat terhadap keberadaan JP dan dampaknya pada sosial masyarakat, diketahui parameter koefisien Keberadaan JP bernilai positif yaitu sebesar 0.695 dan t-statistiknya sebesar 16.102. Artinya jika partisipasi masyarakat dalam perencanaan/pembangunan/pemeliharaan JP meningkat maka kondisi JP akan semakin baik. Dengan semakin baiknya kondisi JP tersebut akan semakin meningkatkan kehidupan sosial masyarakat secara signifikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa JP sangat penting bagi kehidupan sosial masyarakat tani.

Untuk dampak buruk, hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien parameter Keberadaan JP adalah -0.279 dan t-statistiknya sebesar 3.725 artinya

terdapat pengaruh negatif antara keberadaan JP dengan dampak buruk secara signifikan. Dengan kata lain juga dapat diinterpretasikan bahwa jika partisipasi masyarakat dalam perencanaan/pembangunan/pemeliharaan JP meningkat maka kondisi JP akan semakin baik dan dampaknya buruknya menjadi kecil (berkurang). Untuk dampak buruk, berdasarkan analisis yang diperoleh bahwa pengaruhnya negatif, artinya pemerintah tidak perlu terlalu khawatir akan dampak negatif yang ditimbulkan dari pembangunan JP, selama partisipasi masyarakat baik.

3.3. Indikator Penentuan Kelayakan Calon Lokasi Jalan Pertanian

Terdapat empat kriteria yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi pembangunan jalan pertanian. Keempat kriteria dan bobot masing-masingnya adalah: (1) Lokasi, dengan bobot 0,23 ; (2) Kelompok tani, dengan bobot 0,36; (3) Kualifikasi kebun/ sawah, dengan bobot 0,24 dan (4) Sharing perawatan jalan pertanian dengan bobot 0,17. Parameter untuk masing-masing kriteria diuraikan pada Tabel berikut.

Tabel 3. Kriteria dan parameter untuk setiap kriteria jalan pertanian

No	Kriteria	Parameter untuk setiap kriteria
1	Lokasi	1. Kontur lahan rata/sesuai 2. Jalan telah dirintis oleh masyarakat 3. Terhubung dengan jalan lingkungan/kabupaten 4. Berada di kawasan pertanian sesuai RTRW
2	Kelompok tani	1. Kelompok/kelembagaan tani kuat dan aktif 2. Pendirian kelompok lebih dari 3 tahun dan disahkan melalui keputusan kepala daerah setempat 3. Aset kelompok terawat baik dan berkembang 4. Telah membuat proposal yang diketahui/disetujui semua anggota kelompok 5. Tidak terdapat konflik lahan
3	Kualifikasi kebun/ sawah	1. Petani terdampak positif langsung oleh jalan pertanian minimal 15 KK 2. Sawah/kebun di lokasi sedang berproduksi atau masih digarap oleh petani 3. Terdapat pabrik pengolahan atau pasar komoditi pertanian terdekat 4. Terdapat akses titik kumpul untuk mengeluarkan hasil produksi 5. Kondisi kawasan pertanian tsb mendukung untuk menunjang usaha lain (wisata, pendidikan dll) 6. Terdapat sumber air untuk pengairan
4	Sharing perawatan jalan pertanian	1. Bersedia merawat jalan pertanian dengan sumber daya kelompok

2. Dinas/Pemerintah Desa terkait bersedia melakukan supervisi dan pengawasan
3. Kesiadaan anggota kelompok tani melepas lahan untuk jalan pertanian
4. Bersedia mencegah alih fungsi lahan pertanian
5. Bersedia melakukan pembukaan/pengolahan lahan tanpa bakar

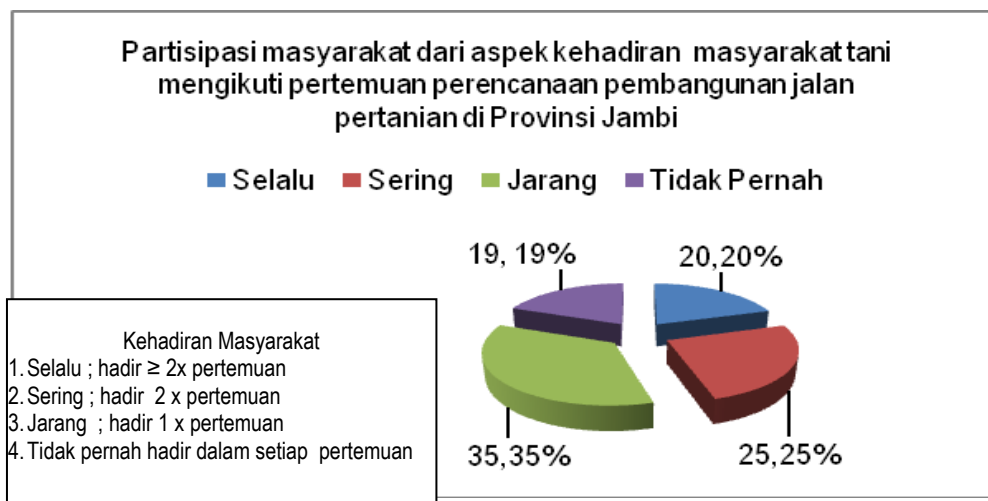
Sumber: Data penelitian, 2018

3.4. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Pertanian

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan pertanian di Provinsi Jambi dapat dilihat dari 3 tahapan pembangunan antara lain perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan pertanian. Hasil analisis ketiga tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pembangunan jalan pertanian

Pada tahapan perencanaan partisipasi masyarakat tani ditunjukkan oleh keikutsertaan masyarakat dalam setiap kali pertemuan penyusunan perencanaan jalan pertanian, kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini,



Gambar 1. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan jalan pertanian di Provinsi Jambi

Pada tahapan perencanaan pembangunan jalan pertanian yang diwujudkan dalam bentuk proposal kegiatan, minimal dilaksanakan 3 kali pertemuan. Gambar 1 diatas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pengguna jalan pertanian pada tahapan perencanaan terutama dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat dalam setiap kali pertemuan termasuk kategori tinggi yaitu masyarakat yang selalu hadir 20,20%, sering 25,25%, jarang 35,35% atau dengan total 80,81% dan tidak pernah hadir 19,19%. Tingginya partisipasi masyarakat tahap perencanaan

disebabkan oleh karena harapan masyarakat pengguna jalan pertanian untuk mendapat jalan pertanian untuk kepentingan transportasi pengangkutan sarana produksi dan hasil pertanian.

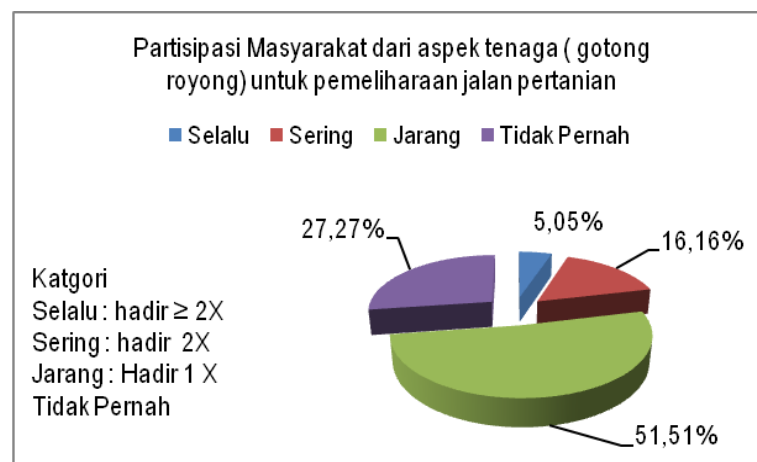
2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan Pertanian

Partisipasi masyarakat pengguna jalan pertanian dalam pelaksanaan pembangunan jalan pertanian dapat berupa bantuan pikiran, tenaga, material/bahan dana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pelaksanaan pembangunan jalan pertanian di Provinsi Jambi, partisipasi masyarakat hanya terlihat dalam bentuk kesediaan masyarakat dalam menyediakan lahan untuk kebutuhan pembangunan jalan pertanian yaitu bentuk hibah, namun tidak terlihat dalam bentuk yang lain karena pelaksanaan pembangunan jalan pertanian dilakukan secara kontraktual atau kegiatan dilaksanakan oleh pihak kontraktor.

Pada tahapan pelaksanaan pembangunan jalan pertanian tersebut pada pembangunan jalan pertanian untuk kebutuhan lahan sawah (jalan usahatani) cenderung mengikutsertakan masyarakat disekitarnya sebagai tenaga kerja, sedangkan jalan produksi diperkebunan cenderung dilaksanakan oleh pihak kontraktor dengan menggunakan peralatan sendiri. Menurut masyarakat walaupun pelaksanaan secara kontraktual sebaiknya mengikutsertakan masyarakat, karena mereka ikut terlibat langsung dalam pembuatan jalan dan secara tak langsung masyarakat bisa mengawasi kualitas jalan yang dibangun oleh pihak kontraktor.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Jalan Pertanian

Pada tahapan ini bentuk partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jalan pertanian dapat berupa materi (tenaga, bahan dan dana) dan non materi (berupa pemikiran). Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jalan pertanian di Provinsi Jambi dari aspek ketenagaan dapat terlihat pada gambar 3.



Gambar 3. Bentuk Partisipasi Masyarakat Tani Dalam Kegiatan Pemeliharaan Jalan Pertanian di Provinsi Jambi

Pada tahapan pemeliharaan bangunan jalan pertanian, partisipasi masyarakat tani dalam bentuk sumbangan materi dan non materi. Pada penelitian ini sumbangan non materi terlihat dalam bentuk tenaga kerja dalam kegiatan gotong royong. Gambar 3 diatas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pengguna jalan pertanian dari aspek tenaga melalui pelaksanaan gotong royong dalam membersihkan jalan pertanian cukup tinggi, terlihat bahwa masyarakat selalu hadir dalam kegiatan gotong royong tersebut hanya 5,05%, sering hadir 16,16%, jarang hadir 51,51% dan tidak pernah hadir sama sekali 27,27%. Kemudian selanjutnya bentuk partisipasi masyarakat pengguna jalan pertanian dalam bentuk sumbangan material dan pendanaan dari wawancara dan observasi lapangan masih minin. Dari hasil observasi yang dilakukan pada beberapa jalan pertanian terlihat bahwa sebagian jalan pada kanan kiri jalan banyak ditumbuhi semak belukar dan jalan mulai agak rusak.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan material dan dana sulit dilakukan karena belum dikelola secara baik atau belum adanya unit organisasi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan jalan tersebut sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Provinsi Bali, secara umum pengelolaan jalan pertanian diatur melalui organisasi kemasyarakatan yang dikenal dengan SUBAK. Pemanfaatan jalan pertanian disebagian lokasi di Provinsi Bali tidak saja untuk kebutuhan transportasi sarana dan prasarana pertanian, tetapi sudah berkembang sarana untuk kepentingan pariwisata dan sarana olahraga (*Jogging track*). Dengan kegiatan oleh raga dan pariwisata di lokasi pertanian tersebut masyarakat tani mendapat pendapatan tambahan dari pengelolaan tiket dan parkir yang dikelola oleh kelompok tani disana yang kemudian dana tersebut digunakan keperluan kelompok tani.

Kebijakan Saat Ini

Volume pembangunan jalan pertanian beberapa tahun terakhir mengalami penurunan karena keterbatasan dana APBD Provinsi dan kabupaten/kota. Peluang pembangunan melalui APBN (dana DAK) terbuka namun pengusulannya yang melalui e-proposal kurang tersosialisasi ke petani. Demikian juga penggunaan Dana Desa untuk pembangunan jalan pertanian menimbulkan keraguan terkait dikeluarkannya Permendes Nomor 19/2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa. Pembangunan jalan pertanian selama ini belum memperhatikan konektivitas dengan jalan desa, jalan kecamatan hingga menembus pasar pertanian terdekat. Perawatan jalan pertanian belum menjadi perhatian. Begitu jalan selesai dibangun dan berita acara selesai ditandatangani, pengawasan OPD terkait terhadap jalan ini terputus.

Implikasi/Rekomendasi Kebijakan

1. Dinas yang menangani fungsi pertanian pangan/hortikultura dan perkebunan disarankan melakukan penilaian proposal jalan pertanian dengan mempertimbangkan empat kriteria dan pembobotan masing-masing (Lokasi,

Kelompok Tani, Kualifikasi Kebun/Sawah dan Sharing Perawatan Jalan) sebagai dasar untuk penentuan calon lokasi pembangunan pertanian.

2. Perencanaan jalan pertanian harus mempertimbangkan konektivitas antarjalan yang ada dengan jalan pertanian yang akan dibangun guna optimalisasi transportasi input dan output pertanian serta efisiensi dana pemerintah.
3. Dana desa dapat dimanfaatkan untuk membangun jalan pertanian. Pemerintah Desa disarankan berkoordinasi dengan dinas yang menangani fungsi pertanian pangan/hortikultura dan perkebunan terkait juknis/juklak serta model jalan dan skema pengerjaan yang tepat (swakelola oleh kelompok tani atau menggunakan jasa pihak ketiga).
4. Dinas/OPD yang menangani fungsi pertanian pangan/hortikultura dan perkebunan disarankan menyosialisasikan peluang sumber dana dari APBN melalui e-proposal kepada kelompok tani dan berkoordinasi dengan OPD yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa tentang peluang pemanfaatan Dana Desa untuk membangun jalan pertanian.
5. Aturan yang mengikat tentang sharing perawatan jalan pertanian disarankan menjadi bagian dari berita acara atau kontrak kerjasama dengan petani, masyarakat setempat (yang lokasinya terpilih untuk pembangunan jalan pertanian) ataupun pihak swasta yang ikut memanfaatkan jalan pertanian tersebut. Hal ini guna menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap pemeliharaan jalan pertanian yang bersumber dari dana pemerintah.
6. Masyarakat tani juga bisa mengajukan proposal untuk memanfaatkan alternatif peluang dana *Corporate Sosial Responsisibility* (CSR) dari perusahaan swasta maupun BUMN untuk pemeliharaan maupun pembangunan Jalan Pertanian.
7. JP sangat dibutuhkan oleh petani untuk kelancaran pengangkutan input dan output produksi pertanian. Untuk itu Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota disarankan agar meningkatkan anggaran untuk pembangunan JP dengan skala prioritas berdasarkan penilaian kriteria calon petani dan calon lokasi pembangunan JP. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa keberadaan Jalan Pertanian dapat meningkatkan perekonomian dan kehidupan sosial petani secara signifikan, sedangkan dampak buruk yang ditimbulkan dari pembangunan JP tidak perlu dikhawatirkan selama partisipasi masyarakat masih baik.
8. Pembangunan jalan usahatani lebih diprioritaskan pada kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sekaligus untuk mendorong meluasnya kawasan LP2B di Provinsi Jambi.
9. Disarankan agar Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan peningkatan jalan pertanian dari konstruksi tanah menjadi pengerasan jalan atau pembetonan untuk jalan pertanian yang telah dimanfaatkan cukup lama dan terawat dengan baik sebagai reward/penghargaan bagi kelompok tani/masyarakat setempat.
10. Pemerintah Kabupaten/Kota agar memperketat regulasi yang melarang alih fungsi lahan pertanian di kawasan yang telah didanai pembangunan jalan pertaniannya.

11. Guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pemeliharaan jalan pertanian agar berkelanjutan di Provinsi Jambi disarankan kepada kelompok tani hal berikut ini:

- Menjadikan kegiatan gotong royong termasuk sumbangan dana perawatan jalan sebagai rencana kerja kelompok tani.
- Membuat aturan tertulis terkait hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam pemanfaatan jalan pertanian sehingga terawat dengan baik.
- Dalam skema pembangunan jalan pertanian secara kontraktual agar memprioritaskan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja.
- Mempromosikan pemanfaatan jalan pertanian untuk tujuan wisata dan olahraga sesuai dengan kreativitas kelompok dan mengangkat kearifan lokal masyarakat setempat.